

**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN MENCABUT IZIN REKLAMASI TELUK
JAKARTA DAN PERLINDUNGAN INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI
UTARA JAKARTA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52
TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 JUNCTIS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2012**

Dhea Ayudita

(1587091)

ABSTRAK

Pencabutan Izin reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di DKI Jakarta yang secara umum memiliki permasalahan kewenangan dalam mencabut izin reklamasi. Dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018. Penulisan skripsi ini membahas kepastian hukum kewenangan mencabut izin reklamasi teluk Jakarta dan perlindungan investor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Jo Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Jis Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh bahwa pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur tidak bertentangan dengan asas-asas Peraturan Perundang-undangan dan Perlindungan Hukum bagi investor akibat pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kata Kunci : Izin Reklamasi, Kewenangan, Pemerintah.

**LEGAL CERTIFICATION OF AUTHORITY TO RELEASE BAY RECLAMATION
PERMISSIONS JAKARTA AND INVESTOR PROTECTION BASED ON
REGULATION GOVERNOR NUMBER 58 OF 2018 CONCERNING
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND THE WORKING OF THE BEACH
RECLAMATION MANAGEMENT COORDINATION AGENCY NORTH JAKARTA IN
CONNECTING TO THE PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 52 OF 1995
JUNCTION PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 122 OF 2012 JUNCTION
GOVERNOR REGULATION NUMBER 121 OF 2012**

Dhea Ayudita

(1587091)

ABSTRACT

Revocation of the reclamation permit conducted by DKI Jakarta regional government is one of the efforts to overcome the problems in DKI Jakarta which generally have authority issues in revoking reclamation permits. Based on Governor Regulation Number 58 of 2018. The writing of this thesis discusses the legal certainty of the authority to revoke Jakarta bay reclamation permit and investor protection based on Governor Regulation Number 58 Year 2018 concerning Formation, Organization and Work Procedure of the Management Coordination Board with Presidential Regulation Number 52 of 1995 Jo Presidential Regulation Number 122 of 2012 Jis Governor Regulation Number 121 of 2012.

The research method used is normative juridical, namely, research focused on examining the application of rules or norms in law. The research carried out is descriptive analytic which describes something with words or sentences, then separated the categories to obtain conclusions. The approach taken is the law approach and the conceptual approach. This writing uses library study techniques and uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials.

Based on this research, it has been obtained that the revocation of Jakarta bay reclamation permit by the Governor based on the Governor's Regulation does not conflict with the principles of Legislation and Legal Protection for investors due to the revocation of Jakarta Bay reclamation permit can file a claim to the Jakarta State Administrative Court.

Keywords: Reclamation, Authority, Government Permit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penelitian	34
BAB II KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH TERKAIT PENCABUTAN IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA	37
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan	37
B. Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi (Gubernur)	48
C. Otonomi Daerah	54
BAB III REKLAMASI PANTAI UTARA DALAM PRESTEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	60
A. Reklamasi Pantai Utara Jakarta	60

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN MENCABUT IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORAGNISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DI HUBUNGGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 JUNCTIS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2012	75
A. Analisis Pencabutan Izin Reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur terhadap Asas-asas Peraturan Perundang-undangan	75
B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor akibat pencabutan Izin Reklamasi Teluk Jakarta	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	